

Dampak Kompetensi, Perencanaan, dan Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Melalui SOP Sebagai Variabel Intervening

[Influence of Competency, Planning, and Financial Reporting of Village Fund Administration, With SOP Acting As a Intervening Variable]

Agung Widodo¹⁾, Supardi^{*.2)}

¹⁾ Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Bisnis Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

²⁾ Dosen Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Bisnis Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

*Email Penulis Korespondensi: supardi@umsida.ac.id

Abstract. *The study focuses on the impact of competence, planning, and financial reporting on village fund management, with Standard Operating Procedures (SOP) acting as a mediating variable. The aim of this research is to determine the extent to which these variables influence the effectiveness of village fund management, which plays a critical role in promoting regional development. A quantitative approach using the SEM-PLS method was employed to analyze the impact of competence, planning, and financial reporting on village fund management across four districts in Sidoarjo Regency, with SOP as an intervening variable. The results show a positive and significant relationship between Village Apparatus Competence, Village Fund Planning, and Village Financial Reporting on Village Fund Management, both directly and through the mediation of SOP. When these three factors interact, they have a strong impact, with a path coefficient of 0.619 and a T-statistics value of 3.485. SOP plays a crucial role as an intervening variable, with an indirect effect of 0.355 and a direct effect of 0.782. This model explains 68.2% of the variation in Village Fund Management, with a Goodness of Fit value of 0.640. The study highlights the importance of improving competence, planning, reporting, and SOP to enhance financial governance.*

Keywords - Competence, Planning, Financial Reports, Village Fund Management and SOP.

Abstrak. *Penelitian yang berfokus pada dampak kompetensi, perencanaan, dan pelaporan keuangan terhadap pengelolaan dana desa, dengan Standar Prosedur Operasional (SOP) bertindak sebagai variabel mediasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan sejauh mana variabel-variabel ini mempengaruhi kemandirian pengelolaan dana desa, yang memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode SEM-PLS untuk menganalisis dampak kompetensi, perencanaan, dan laporan keuangan terhadap pengelolaan dana desa di empat kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, dengan SOP sebagai variabel intervening. Hasil penelitian menemukan hubungan positif dan signifikan antara Kompetensi Aparatur Desa, Perencanaan Dana Desa, dan Laporan Keuangan Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa, baik secara langsung maupun melalui mediasi Standar Prosedur Operasional (SOP). Ketiga faktor tersebut, ketika berinteraksi, memberikan dampak kuat dengan koefisien jalur 0,619 dan T-statistics 3,485. SOP berperan penting sebagai variabel intervening dengan pengaruh tidak langsung 0,355 dan pengaruh langsung 0,782. Model ini menjelaskan 68,2% variasi Pengelolaan Dana Desa, dengan Goodness of Fit 0,640. Penelitian menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi, perencanaan, pelaporan, dan SOP untuk tata kelola yang lebih baik.*

Kata Kunci - Kompetensi, Perencanaan, Laporan Keuangan, Pengelolaan Dana Desa dan SOP

I. PENDAHULUAN

Dokumen ini adalah petunjuk penulis dan template artikel yang baru untuk UMSIDA Preprints Server. Setiap artikel yang dikirimkan ke redaksi UMSIDA Preprints Server harus mengikuti petunjuk penulisan ini. Jika artikel tersebut Pengelolaan dana desa yang efektif di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan pedesaan, memerlukan pendekatan multifaset yang mencakup kompetensi, perencanaan, dan dokumentasi keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa keahlian aparatur desa secara signifikan mempengaruhi pengelolaan dana, karena mereka yang memiliki pengetahuan yang memadai dapat membuat keputusan berdasarkan informasi dan melaksanakan program secara efektif [1], [2]. Namun, kompetensi ini harus dipasangkan dengan perencanaan yang ketat untuk memastikan sumber daya dialokasikan dengan bijaksana dan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan dana [3], [4]. Selain itu, dokumentasi keuangan yang transparan sangat penting untuk akuntabilitas, karena menumbuhkan kepercayaan dan memungkinkan pengawasan efektif pemanfaatan dana. Menetapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) dapat meningkatkan sinergi antara elemen-elemen tersebut, memastikan bahwa kompetensi,

perencanaan, dan pelaporan keuangan bekerja secara kohesif untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup penduduk pedesaan[5].

Pembangunan desa merupakan fokus utama di tingkat nasional dengan tujuan mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dana desa yang dikelola secara efektif diantisipasi untuk mendorong kemajuan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan bagi penduduk desa. Meskipun demikian, pelaksanaan praktis pengelolaan dana desa sering menghadapi banyak tantangan[6]. Tantangan utama berkaitan dengan kurangnya kemahiran otoritas desa yang ditunjuk dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Kompetensi yang diperlukan untuk otoritas desa meliputi ketajaman teknis, keahlian manajerial, dan pemahaman yang komprehensif tentang peraturan dan kebijakan yang mengatur pemanfaatan dana desa[7].

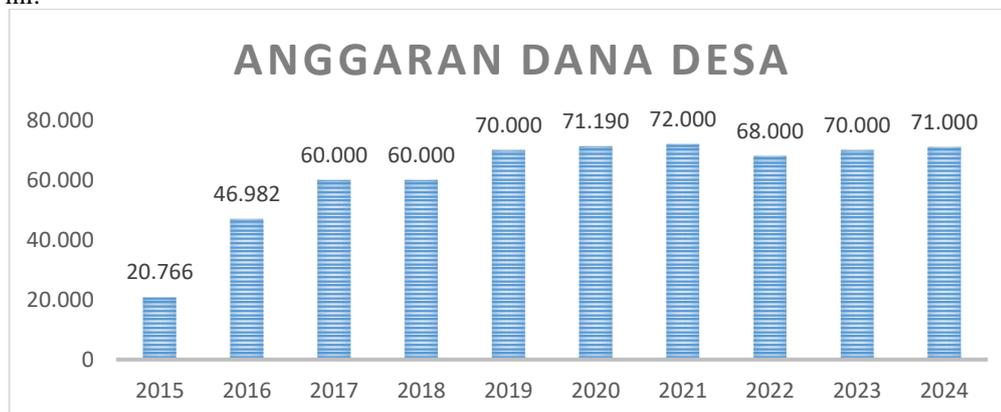
Kekurangan kompetensi ini dapat menyebabkan pengelolaan dana desa yang kurang optimal dan tidak efektif, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan dana. Selain kompetensi, perencanaan yang cermat muncul sebagai penentu penting dalam administrasi dana desa. Perencanaan yang efektif harus didasarkan pada kebutuhan otentik masyarakat desa, melibatkan keterlibatan aktif anggota masyarakat, dan mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang tersedia di desa[8]. Dengan tidak adanya perencanaan yang kuat, alokasi dana desa berisiko tidak selaras dengan tujuan yang ditargetkan, akibatnya menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa. Tantangan yang dihadapi dalam perencanaan dana desa sering dikaitkan dengan kelangkaan data yang akurat, keterlibatan masyarakat yang tidak memadai, dan koordinasi yang tidak memadai antara otoritas desa dan entitas pemerintah tingkat tinggi[9].

Selain itu, pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan komponen fundamental dalam tata kelola dana desa. Laporan keuangan yang mahir harus secara akurat mencerminkan alokasi dan pemanfaatan dana desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya sambil mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang diakui. Namun, banyak desa terus bergulat dengan hambatan dalam perumusan laporan keuangan, seperti kelangkaan sumber daya manusia yang dilengkapi dengan pengetahuan dan keahlian akuntansi, bersama dengan tidak adanya sistem dan teknologi yang memfasilitasi pelaporan keuangan yang efektif[10]. Laporan keuangan yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik dan skeptisisme di antara para pemangku kepentingan, sehingga menghalangi proses evaluasi pemanfaatan dana desa.

Menanggapi tantangan tersebut, penetapan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang jelas dan konsisten berpotensi meningkatkan kemandirian pengelolaan dana desa. SOP berfungsi sebagai kerangka kerja bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan tanggung jawab mereka, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemanfaatan dana desa[11].

SOP yang efektif harus dirumuskan berdasarkan praktik terbaik dan disesuaikan dengan kondisi kontekstual yang unik dari setiap desa[12]. Pengenalan SOP diharapkan dapat menetapkan standar kerja yang lebih tinggi, meminimalkan kesalahan, dan menambah transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola dana desa.

Jumlah Anggaran Dana Desa di Indonesia dari Tahun 2015 sampai dengan 2024 seperti yang terlihat pada gambar 1.1 dibawah ini:



Sumber : [13]

Gambar 1.1
Jumlah Anggaran Dana Desa Dari Tahun 2015 – 2024

Pada gambar 1.1, terlihat adanya peningkatan anggaran Dana Desa dari tahun 2015 yang awalnya sebesar Rp.20,766 triliun menjadi Rp.71 triliun di tahun 2024. Walaupun terdapat penurunan jumlah anggaran di tahun 2022 yaitu turun menjadi sebesar Rp.68 triliun, namun kembali meningkat ditahun 2023 dan 2024. Peningkatan jumlah anggaran tersebut menjelaskan bahwa, penyerapan anggaran dana desa dapat dikelola dengan baik. Sesuai dengan tujuan Dana Desa yaitu; meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan, pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa), maka Dana Desa harus di kelola dengan baik.

Berdasarkan prinsip pengelolaannya, Dana Desa tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, dimana dalam perencanaan, pelaksanaan dan juga kegiatan evaluasinya melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa dan semua kegiatan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis dan juga secara hukum. Hal ini dimaksudkan agar Dana Desa tersebut dapat dipergunakan secara baik yaitu terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

Perencanaan Anggaran Dana Desa yaitu Suatu rencana atau alokasi dana untuk membiayai rencana kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat[14]. Dalam perencanaan Kepala Desa menugaskan Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya yaitu Menyusun DPA paling lama tiga hari kerja setelah peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan, yang terdiri dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan Rencana Anggaran Biaya. Asas pengelolaan dana desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik, dan tertuang dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yakni :

1. **Transparan**, dana desa harus diketahui oleh masyarakat desa baik itu pada saat dana tersebut masuk ataupun dikeluarkan untuk digunakan. Keluar masuknya dana harus dapat dijabarkan oleh perangkat desa kepada seluruh warga desa. Dengan demikian, maka asas ini menjamin adanya aparat desa yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, serta adil mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
2. **Akuntabel**, yaitu kewajiban untuk pertanggungjawaban pengelolaan serta pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, asas akuntabel ini menentukan bahwa aktivitas serta hasil akhir penyelenggaraan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang
3. **Partisipatif**, asas ini mengharuskan kelembagaan desa serta unsur masyarakat desa diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. **Tertib serta disiplin anggaran**, yakni landasan ataupun pedoman dalam mengelola keuangan desa harus dilaksanakan secara tertib dan disiplin.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan yakni:

a) Rencana pendapatan yang memuat gambaran yang ternilai secara logis bisa di diperoleh untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan anggaran belanja ialah batas maksimal pengeluaran belanja.

b) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup serta tidak dibenarkan melaksanakan aktivitas yang belum tersedia ataupun tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/perubahan APB Desa.

c) Semua penerimaan serta pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa serta dilakukan melalui Rekening Kas Desa. (Icuk Rangga dan Erwin Setyadi, 2019).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang keuangan desa. Peraturan yang dimaksud untuk memberikan landasan hukum di bidang keuangan desa, sumber keuangan dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Laporan Keuangan terkait realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan keuangan atas realisasi pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa, maka perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan diinformasikan kepada Masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Secara umum indikator aspek berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 adalah :

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan
3. Laporan Keuangan disampaikan kepada Masyarakat secara tertulis dan melalui media yang dapat diakses oleh Masyarakat.

Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, signifikansi dan peran strategis desa dalam konteks pembangunan nasional telah meningkat secara nyata. Instrumen utama yang dialokasikan oleh pemerintah untuk merangsang pembangunan di tingkat desa adalah penyaluran Dana Desa. Dana Desa merupakan sumber fiskal yang disediakan oleh pemerintah pusat untuk memfasilitasi pelaksanaan inisiatif pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di dalam desa. Alokasi Dana Desa yang ditargetkan dan manjur sangat bergantung pada manajemen yang mahir, di mana pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) muncul sebagai elemen penting dalam proses menyeluruh.

SOP merupakan panduan komprehensif yang mencakup arahan terdokumentasi mengenai cara di mana tugas atau proses tertentu harus dijalankan untuk memastikan konsistensi dan hasil berkualitas. Dalam kerangka pengelolaan Dana Desa, SOP berfungsi sebagai referensi penting bagi pemerintah desa karena mereka menavigasi tahapan administrasi dana yang beragam, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan dan evaluasi. SOP yang dibuat dengan cermat dapat menjamin bahwa setiap fase dalam pengelolaan Dana Desa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus mengurangi risiko kesalahan atau penyalahgunaan.

Alokasi yang berasal dari Dana Desa mencakup beragam kegiatan yang memerlukan perencanaan partisipatif, penganggaran transparan, pelaksanaan yang efektif, dan pelaporan dan penilaian yang akuntabel. Dengan tidak adanya SOP yang diartikulasikan dengan jelas, proses pengelolaan Dana Desa[15] dapat menghadapi hambatan yang signifikan, termasuk inkonsistensi dalam pengambilan keputusan, keterlambatan pelaksanaan program, dan tantangan dalam akuntabilitas keuangan. Selain itu, ambiguitas dalam pedoman prosedural dapat menciptakan kerentanan yang memfasilitasi korupsi dan penyalahgunaan dana, yang pada akhirnya berdampak buruk pada masyarakat desa.

Pelaksanaan SOP yang efektif dalam pengelolaan Dana Desa juga berperan penting dalam meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam memenuhi tanggung jawabnya. Melalui penerapan SOP, pemerintah desa diberikan panduan eksplisit mengenai tindakan yang harus dilakukan, termasuk waktu dan metodologi pelaksanaan. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga mendorong pembentukan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di tingkat desa[16].

Meskipun demikian, meskipun sangat penting, pelaksanaan SOP dalam alokasi Dana Desa terus menghadapi segudang tantangan. Desa-desa tertentu mungkin tidak memiliki SOP yang memadai, atau SOP yang ada saat ini mungkin tidak selaras dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Selain itu, kendala yang berkaitan dengan sumber daya manusia, yang mencakup pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam memahami dan menerapkan SOP, merupakan penghalang yang tangguh. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif untuk merumuskan dan menyebarkan SOP yang sesuai dengan karakteristik unik setiap desa, di samping memberikan pelatihan yang memadai bagi aparatur desa[17].

Dalam upaya meningkatkan kemandirian pengelolaan Dana Desa, sangat penting bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait untuk terus mengadvokasi pelaksanaan SOP yang tepat dan efektif. Ini mencakup pengembangan SOP yang komprehensif dan mudah dipahami, serta pembentukan kerangka kerja pemantauan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur ini. Dengan demikian, Dana Desa dapat dialokasikan dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat desa, sekaligus mendukung realisasi tujuan pembangunan nasional[18].

Pentingnya SOP dalam pengelolaan Dana Desa melampaui sekadar penetapan prosedur; itu juga memupuk kerangka kerja yang memungkinkan desa untuk terlibat dalam praktik pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini diantisipasi untuk menumbuhkan kepercayaan di antara anggota masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam administrasi desa, sekaligus memperkuat tata kelola yang baik dalam konteks desa[19]. Dengan demikian, SOP muncul sebagai komponen fundamental dalam memastikan bahwa Dana Desa benar-benar menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.

Pada penelitian sebelumnya disebutkan bahwa Untuk mengetahui seberapa baik suatu pengelolaan keuangan desa, maka perlu dilakukan analisis kinerja keuangan (Eva, 2019). Analisis kinerja keuangan pemerintah desa merupakan pengukuran atau penilaian terhadap kinerja pemerintah desa mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan pada bidang keuangan dalam jangka waktu tertentu.

menurut Wasistiono dan Tahir (2006) dalam Noviyanti & Mulyana (E-Joinal IPDN Vol.5 No.1, 2018) menyatakan bahwa unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu:

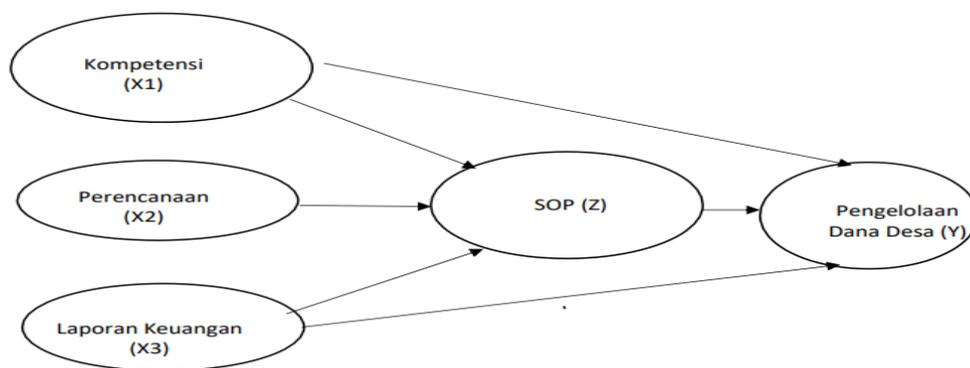
1. Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah.
2. Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintahan desa, sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun sebagai operasional.
3. Rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.
4. Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan.

Berdasarkan tinjauan komprehensif dari literatur yang ada[20][21], beberapa kesenjangan penelitian memerlukan identifikasi:

1. Fungsi Intervensi SOP belum diselidiki secara ekstensif: Meskipun SOP diakui sebagai komponen penting dalam administrasi Dana Desa, ada kekurangan penelitian yang secara eksplisit menganalisis SOP sebagai variabel intervensi. Hal ini menunjukkan kurangnya pemeriksaan menyeluruh mengenai bagaimana SOP

dapat menengahi atau meningkatkan hubungan antara kompetensi pemerintah desa, proses perencanaan, dan dokumentasi keuangan sehubungan dengan kemanjuran pengelolaan Dana Desa.

2. Metodologi Kuantitatif yang Tidak Mencukupi untuk Mengevaluasi Efektivitas SOP: Investigasi sebelumnya sebagian besar menggunakan metodologi kualitatif atau pendekatan studi kasus tanpa menilai secara kuantitatif peran SOP sebagai variabel intervensi. Hal ini mengakibatkan kekosongan yang signifikan dalam evaluasi dampak SOP terhadap pengelolaan Dana Desa.
3. Penekanan pada Faktor Terisolasi Tanpa Menggabungkan Peran SOP: Sejumlah studi menangani kompetensi, perencanaan, dan laporan keuangan secara terpisah. Namun demikian, penelitian yang mensintesis ketiga elemen ini dalam kerangka yang lebih komprehensif yang menganggap peran SOP sebagai variabel intervensi tetap langka.
4. Variabilitas Konteks Lokal Tidak Diakui Secara Memadai: Studi sebelumnya sering mengabaikan variabilitas konteks lokal yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi SOP. Unsur-unsur seperti dinamika budaya lokal, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan dari pemerintah daerah belum cukup diperiksa, mengarah pada kesimpulan yang mungkin tidak dapat diterapkan secara luas.



Berdasarkan berbagai penjelasan dan hubungan antar variabel serta tujuan penelitian untuk menguji hipotesis yaitu:

1. Kompetensi Aparatur Desa, Perencanaan, laporan Keuangan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Pengelolaan Dana Desa
2. Kompetensi Aparatur Desa, Perencanaan, Laporan Keuangan berpengaruh secara Parsial dan simultan terhadap SOP Laporan Keuangan Dana Desa
3. SOP Laporan keuangan berpengaruh Terhadap Pengelolaan Dana Desa
4. Kompetensi Aparatur Desa, Perencanaan, laporan Keuangan berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa Melalui SOP laporan Keuangan sebagai variabel Intervening

II. METODE

JENIS PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif untuk menguji dampak kompetensi, perencanaan, dan laporan keuangan terhadap pengelolaan dana desa, dengan SOP sebagai variabel intervening, dimana metode ini dipilih karena kemampuannya dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara statistik untuk mengukur hubungan antar variabel dengan presisi. Populasi penelitian mencakup seluruh aparatur desa di 4 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Tanggulangin, Buduran, Taman, dan Candi), dengan ukuran sampel yang representatif ditentukan menggunakan rumus Slovin pada tingkat kepercayaan 95% dan margin error 5%. [22]. Data primer akan dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden terpilih, mencakup pertanyaan-pertanyaan terkait kompetensi aparatur desa, proses perencanaan, laporan keuangan, SOP, dan pengelolaan dana desa. Analisis data akan menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) untuk menguji hubungan antar variabel dan peran mediasi SOP, meliputi uji validitas dan reliabilitas instrumen, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis jalur untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung, serta uji hipotesis. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang dapat divalidasi dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Sidoarjo, memungkinkan pengujian hipotesis yang objektif dan generalisasi hasil ke populasi yang lebih luas.

POPULASI DAN SAMPEL

Penelitian ini dilaksanakan di empat kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Buduran, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Candi, dengan pendekatan dua tahap yang komprehensif untuk memastikan pengumpulan data yang mendalam dan akurat. Tahap pertama melibatkan penelitian awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami fenomena-fenomena yang ada dan berkembang di lokasi penelitian, memberikan konteks yang kaya dan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika lokal yang dapat mempengaruhi variabel-variabel penelitian. Tahap kedua merupakan penyebaran kuesioner yang dirancang secara cermat untuk mengumpulkan data kuantitatif yang berkaitan langsung dengan pengukuran variabel-variabel penelitian, termasuk kompetensi aparatur desa, perencanaan, laporan keuangan, pengelolaan dana desa, dan SOP sebagai variabel intervening. Pendekatan dua tahap ini memungkinkan peneliti untuk memadukan wawasan kualitatif dari observasi lapangan dengan data kuantitatif dari kuesioner, menciptakan basis yang kuat untuk analisis yang komprehensif dan nuansa tentang bagaimana faktor-faktor ini berinteraksi dalam konteks pengelolaan dana desa di Kabupaten Sidoarjo [23].

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian berjudul "Dampak Kompetensi, Perencanaan, dan Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Melalui SOP Sebagai Variabel Intervening" adalah kuesioner yang disebarakan kepada responden di empat kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Buduran, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Candi. Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa di masing-masing kecamatan tersebut [24]. Kuesioner ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kompetensi aparatur desa, proses perencanaan, laporan keuangan, penerapan SOP, dan efektivitas pengelolaan dana desa. Selain itu, juga terdapat pertanyaan mengenai SOP sebagai variabel intervening. Kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai persepsi aparatur desa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana desa. Tahapan pengumpulan data primer dalam penelitian kuantitatif ini melibatkan distribusi kuesioner secara langsung kepada aparatur desa di lokasi penelitian, serta melalui platform online seperti Google Form untuk memfasilitasi pengumpulan data yang lebih efisien [25]. Demografi yang diteliti meliputi aparatur desa dengan berbagai tingkat jabatan dan pengalaman dalam pengelolaan dana desa. Pengumpulan data menggunakan skala Likert dengan lima skala yang terdiri dari 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Netral), 4 (Setuju), dan 5 (Sangat Setuju), yang memungkinkan peneliti untuk mengukur sikap dan persepsi responden terhadap variabel-variabel yang diteliti dengan lebih akurat dan komprehensif [23].

Teknik Analisis Data

Untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang terlibat, penelitian ini menggunakan aplikasi SEM-PLS (Structural Equation Modeling-Partial Least Squares). [26] Metode SEM-PLS adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis model persamaan struktural dan memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut [27]. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menerapkan rumus slovin, penelitian ini memiliki kerangka yang kuat untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan. Kemudian, dengan menggunakan aplikasi SEM-PLS, penelitian ini dapat menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang terlibat. [28] Penggunaan PLS melibatkan pengukuran model (outer model) untuk menguji validitas dan reliabilitas variabel dari indikator, pengukuran model struktural (inner model) untuk menguji pengaruh antar variabel laten, serta uji hipotesis dengan membandingkan nilai t-tabel dan t-statistik. Beberapa kriteria pengukuran yang digunakan antara lain convergent validity, discriminant validity, composite reliability, cronbach alpha untuk outer model dan R-square, Q-square, serta GoF untuk inner model. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan probabilitas nilai ttable dan nilai t-statistik dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$. Ketika t-statistik > ttable berarti hipotesis didukung atau diterima, seperti: [29]

- a. Apabila probabilitas hasil $\geq 0,05$ maka hipotesis ditolak
- b. Apabila probabilitas hasil $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Keadaan Umum

Kabupaten Sidoarjo merupakan divisi administrasi yang signifikan di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, yang diakui karena kepentingan strategisnya dalam bidang ekonomi, industri, dan pariwisata. Terletak di sebelah selatan Kota Surabaya, Sidoarjo berfungsi sebagai zona penyangga penting bagi wilayah metropolitan. Tinjauan Kabupaten Sidoarjo disajikan sebagai berikut:

1. Lokasi Geografis Lokasi

Sidoarjo secara geografis berbatasan dengan Kota Surabaya di utara, Kabupaten Gresik di barat laut, Kabupaten Mojokerto di barat, Kabupaten Pasuruan di selatan, dan Selat Madura di timur. Luas: Total luas yang dicakup oleh Kabupaten Sidoarjo kurang lebih 634,89 km². Topografi: Wilayah ini sebagian besar memiliki medan datar, dengan zona pantai tertentu yang terletak di perimeter timur yang berbatasan dengan laut.

2. Penduduk Jumlah Penduduk

Sidoarjo dicirikan oleh populasi yang cukup besar, dengan perkiraan jumlah penduduk sekitar 2,2 juta penduduk menurut sensus terbaru. Komposisi Penduduk: Profil demografis menunjukkan bahwa kelompok etnis yang dominan adalah Jawa, dengan mayoritas yang signifikan menganut Islam.

3. Ekonomi Industri

Sidoarjo diakui sebagai pusat industri terkemuka di Jawa Timur, terutama unggul di sektor manufaktur, tekstil, dan produk makanan. Banyak kawasan industri yang luas didirikan di distrik ini, terutama di daerah Waru, Buduran, dan Taman. Pertanian dan Perikanan: Sementara kegiatan industri mendominasi lanskap ekonomi, Sidoarjo juga memiliki sektor pertanian yang berkembang dengan baik, terutama berfokus pada budidaya padi, bersama dengan akuakultur di daerah pesisir yang menghasilkan ikan dan udang bandeng. UMKM: Kabupaten ini adalah rumah bagi segudang usaha kecil dan menengah, termasuk pengerjaan kulit, usaha pengolahan makanan, dan batik khas Sidoarjo.

4. Infrastruktur Transportasi

Karena posisi geografisnya yang menguntungkan, Sidoarjo mendapat manfaat dari infrastruktur transportasi yang kuat. Ada jaringan jalan yang luas, termasuk akses jalan tol yang memfasilitasi konektivitas antara Sidoarjo dan Surabaya serta daerah perkotaan lainnya. Selain itu, Bandara Internasional Juanda terletak di wilayah Sidoarjo, yang diakui sebagai salah satu bandara tersibuk di Indonesia. Pelabuhan: Meskipun ada garis pantai di dalam Sidoarjo, pelabuhan utama yang melayani daerah ini adalah Pelabuhan Tanjung Perak yang terletak di Surabaya. Jaringan Kereta Api: Sidoarjo juga terintegrasi ke dalam sistem kereta api yang menghubungkan berbagai daerah di Jawa Timur dan sekitarnya.

5. Pariwisata Desa Wisata

Beberapa komunitas di Sidoarjo telah dikembangkan menjadi desa wisata, seperti Desa Wisata Tlocor dan Desa Wisata Penatarsewu, yang menampilkan keindahan alam dan warisan budaya lokal. Wisata Budaya dan Kuliner: Distrik ini terkenal dengan persembahan kulinernya yang khas, termasuk bandeng asap dan kerupuk udang. Selain itu, ada berbagai situs warisan budaya, seperti candi dan landmark bersejarah. Wisata Lumpur Lapindo: Fitur terkenal di Sidoarjo adalah Lumpur Lapindo, yang, meskipun berasal dari bencana, telah berkembang menjadi situs yang sering dikunjungi wisatawan.

6. Pendidikan Sekolah dan Perguruan Tinggi

Sidoarjo memiliki beragam institusi pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga menengah, di samping beberapa lembaga pendidikan tinggi. Kedekatannya dengan Surabaya meningkatkan akses ke sumber daya pendidikan yang lebih luas yang tersedia di wilayah metropolitan.

7. Mengatur Ibukota Kabupaten

Ibukota administrasi Kabupaten Sidoarjo terletak di Kota Sidoarjo, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi, dan keterlibatan masyarakat. Pemerintah Desa: Kabupaten Sidoarjo dibagi lagi menjadi 18 kecamatan, meliputi ratusan desa, masing-masing diatur oleh pemerintah daerah masing-masing.

Dengan perkembangan ekonomi yang pesat, khususnya di sektor industri, ditambah dengan penempatan geografisnya yang strategis, Kabupaten Sidoarjo menempati peran penting dalam lanskap ekonomi Jawa Timur dan merupakan salah satu daerah yang mengalami momentum pertumbuhan yang signifikan. Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo, serupa dengan berbagai daerah lain di seluruh Indonesia, merupakan alokasi sumber daya keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang ditujukan untuk kemajuan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Sumber daya keuangan ini digunakan untuk beragam inisiatif pengembangan infrastruktur dan kegiatan ekonomi yang berakar dalam konteks desa. Keadaan Umum Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo tersebar di 18 kecamatan. Alokasi keuangan Dana Desa untuk setiap desa bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti ukuran populasi, keadaan geografis, dan indeks kemiskinan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa:

1. Infrastruktur

Sebagian besar Dana Desa dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur, yang meliputi pembangunan jalan desa, sistem irigasi, jembatan kecil, dan fasilitas komunal lainnya. Kesejahteraan masyarakat: Alokasi juga diarahkan pada inisiatif pemberdayaan masyarakat, yang meliputi pelatihan kewirausahaan, stimulasi usaha usaha kecil, dan peningkatan produktivitas pertanian. Soal dan Kesehatan: Menanggapi pandemi COVID-19, terjadi realokasi Dana Desa yang signifikan, terutama ditujukan untuk penyediaan bantuan tunai langsung (BLT) untuk populasi yang terkena dampak, di samping inisiatif yang ditujukan untuk kesehatan masyarakat di desa.

2. Pengawasan dan Transparansi

Untuk menjamin pemanfaatan Dana Desa yang efektif, baik badan pemerintah daerah maupun pusat berkolaborasi untuk menerapkan mekanisme pengawasan. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat dipupuk melalui musyawarah desa untuk memastikan alokasi dana yang diprioritaskan.

Tantangan:

1. Penyerapan Dana

Sejumlah besar desa mengalami kesulitan dalam memaksimalkan penyerapan Dana Desa. Hal ini dapat dikaitkan dengan tantangan administrasi atau kekurangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa yang diperlukan untuk pengelolaan dana yang efektif. Korupsi dan Penyimpangan: Terlepas dari penerapan langkah-langkah pengawasan yang ketat, kasus penyalahgunaan Dana Desa tetap ada di daerah tertentu, berpotensi mencakup korupsi atau pemanfaatan sumber daya yang tidak tepat.

2. Inovasi

Beberapa desa di Sidoarjo telah memulai pembentukan inisiatif inovatif yang didasarkan pada Dana Desa, seperti promosi desa wisata, konversi limbah menjadi produk yang layak secara komersial, dan digitalisasi layanan desa untuk meningkatkan transparansi.

Efektivitas penyebaran Dana Desa di Sidoarjo sebagian besar bergantung pada keterlibatan masyarakat, transparansi dalam praktik pengelolaan, dan kolaborasi sinergis antara desa, kabupaten, dan pemerintah pusat.

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah para aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di 40 kecamatan pada Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Data mengenai responden yang dikumpulkan melalui kuesioner maupun berbagai data sekunder yang bersumber langsung dari aparatur desa dan juga pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, sehingga dapat diketahui mengenai karakteristik responden yang terdiri dari; 1) Usia Responden; 2) Pendidikan Terakhir Responden sebagai berikut :

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Responden

Karakteristik responden yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah usia responden, seperti yang terlihat pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Usia	f	Persen (%)
1.	25 -33	17	42,5
2.	34 -42	16	40
3.	43 - 51	5	12,5
4.	52 -60	2	5
TOTAL		40	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2024)

Dari tabel diatas diketahui responden yang berusia 25-33 tahun sebanyak 17 orang (42,5%), usia 34-42 tahun sebanyak 16 orang (40%) dan sisanya berada pada rentang usia 43 – 51 tahun yaitu sebanyak 5 orang (12,5%) dan juga 52 – 60 sebanyak 2 orang (5%).

Jenjang Pendidikan Terakhir

Sebaran jenjang pendidikan terakhir responden seperti yang disajikan pada pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2
Jenjang Pendidikan Terakhir Responden

No.	Jenjang Pendidikan	f	Persen (%)
1.	S1	29	72,5
2.	D III	5	12,5
3.	SLTA Umum	5	12,5
4.	SLTA Kejuruan	1	2,5
TOTAL		40	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer (2024)

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa 72,5 % responden memiliki jenjang pendidikan Strata 1 (S1), yang berarti sebagian besar reponden mempunyai tingkat pendidikan sesuai dengan yang dibutuhkan sebagai seorang aparatur Desa. Banyaknya jumlah responden yang memiliki tingkat pendidikan akhir Strata 1, menunjukkan bahwa dari segi keilmuan sebagai seorang aparatur desa telah cukup baik untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya.

Analisi Model Pengukuran

Pendekatan analisis data penelitian ini bermodal *Partial Least Squares (PLS)* yang berbasis pada Smart PLS versi 4. Pada dasarnya PLS merupakan pendekatan *Structural Equation Modeling (SEM)* yang lebih menyeluruh dibandingkan metode-metode sebelumnya. SEM memberikan tingkat analisis yang lebih dalam pada penelitian

dengan mengintegrasikan teori dan data, serta dapat mengikuti jalur melalui variabel laten, oleh karena itu SEM biasa digunakan dalam penelitian ilmu sosial.

Uji Kelayakan Instrumen (*Outer Model*)

Tujuan pengukuran SmartPLS adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel laten dan berbagai indikator. Model pengukuran ini tentu saja terbagi menjadi dua pengujian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, yaitu sebagai berikut :

1. Uji Validitas

Uji Validitas kali ini mencakup beberapa aspek pengujian data menggunakan aplikasi Smart-PLS 4 untuk melakukan pengolahan data secara detail mengacu pada referensi dan Batasan-batasan maupun syarat yang dimiliki masing-masing pengujian, hasil olah data yang di dapatkan adalah sebagai berikut:

a. Uji Validitas Konvergen

Uji Validitas Konvergen melakukan proses verifikasi kebenaran pernyataan kuesioner. Tahap ini melakukan proses uji validitas yang mencakup uji validitas konvergen dan skor AVE (*Average Variance Extracted*). Uji Validitas Konvergen melakukan pemeriksaan pada bagian *Outer Loading*, sedangkan untuk pemeriksaan skor AVE melalui *Construct Reliability and Validity*.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Konvergen (*Outer Loading*)

	Kompetensi Aparatur Desa	Perencanaan Dana Desa	Laporan Keuangan	SOP Laporan Keuangan	Pengelolaan Dana Desa
X1.1	0.789				
X1.2	0.806				
X1.3	0.811				
X1.4	0.727				
X1.5	0.819				
X1.6	0.791				
X1.7	0.780				
X1.8	0.766				
X1.9	0.811				
X1.10	0.816				
X1.11	0.857				
X1.12	0.783				
X1.13	0.763				
X1.14	0.836				
X1.15	0.797				
X1.16	0.774				
X1.17	0.742				
X1.18	0.717				
X1.19	0.757				
X.2.1		0.771			
X.2.2		0.798			
X.2.3		0.839			
X.2.4		0.720			
X.2.5		0.804			
X.2.6		0.780			
X.2.7		0.870			
X3.1			0.878		
X3.2			0.875		
X3.3			0.883		
X3.4			0.749		
X3.5			0.765		
X3.6			0.744		
X3.7			0.811		
X3.8			0.784		
X3.9			0.742		
X3.10			0.705		

X3.11			0.798		
X3.12			0.779		
X3.13			0.734		
X3.14			0.765		
X3.15			0.856		
X3.16			0.843		
Z.1				0.775	
Z.2				0.764	
Z.3				0.716	
Z.4				0.832	
Z.5				0.835	
Z.6				0.846	
Z.7				0.765	
Z.8				0.774	
Z.9				0.798	
Z.10				0.839	
Z.11				0.720	
Z.12				0.766	
Y.1					0.811
Y.2					0.816
Y.3					0.857
Y.4					0.783
Y.5					0.763
Y.6					0.765
Y.7					0.744
Y.8					0.811
Y.9					0.784

Sumber: Olah Data (2024)

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Average Variance Extracted (AVE)

	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa	0.675	Valid
Perencanaan Dana Desa	0.598	Valid
Laporan Keuangan	0.632	Valid
SOP Lapran Keuangan	0.619	Valid
Pengelolaan Data	0.595	Valid

Sumber: Olah Data (2024)

Uji Validitas Konvergen seperti yang telah dijelaskan di dalam Teknik Analisis Data memiliki syarat nilai *Outer Loading* yang diharuskan melebihi nilai kritis yang sudah ditentukan yaitu $>0,7$. Melihat dari Tabel 1 *Outer Loading* berisi nilai dari masing-masing *loading factor*, yang kesemua faktornya berwarna “Hijau” yang menandakan nilainya sudah melebihi syarat yang ditentukan ($>0,7$). Kemudian, pada tabel 2 nilai Average Variance Extracted (AVE) dari setiap Variabel Laten mengindikasikan melebihi ambang batas yang di tentukan ($>0,5$).

Maka, dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan “*Valid Konvergen*”. Serta, Variabel tersebut memiliki validitas konvergen yang baik dikarenakan nilai AVE melebihi dari 50% varians yang dihasilkan oleh indikator-indikator tersebut dapat dijelaskan oleh variabel laten.

b. Uji Validitas Diskriminan

Tabel 5
Discriminant Validity – Fornell Larcker

	Kompetensi Aparatur Desa	Laporan Keuangan Desa	Pengelolaan Dana Desa	Perencanaan Dana Desa	SOP
Kompetensi Aparatur Desa	0.812				
Laporan Keuangan Desa	0.636	0.845			

Pengelolaan Dana Desa	0.697	0.730	0.857		
Perencanaan Dana Desa	0.663	0.613	0.710	0.865	
SOP	0.638	0.660	0.621	0.672	0.829

Sumber: Olah Data (2024)

Uji Validitas Diskriminan kali ini menggunakan parameter atau kriteria *Fornell-Larcker* untuk melakukan proses Pengujian data, Uji Validitas Diskriminan mensyaratkan nilai akar kuadrat dari varians rata-rata yang diekstraksi oleh suatu konstruk harus lebih besar daripada korelasi antara konstruk tersebut dan konstruk lainnya. Jika dilihat dari Tabel 5, Nilai-nilai *Fornell-Larcker* tiap-tiap konstruk > dari nilai konstruk lainnya. Maka, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dianggap “Valid Diskriminan”.

2. Uji Reliabilitas

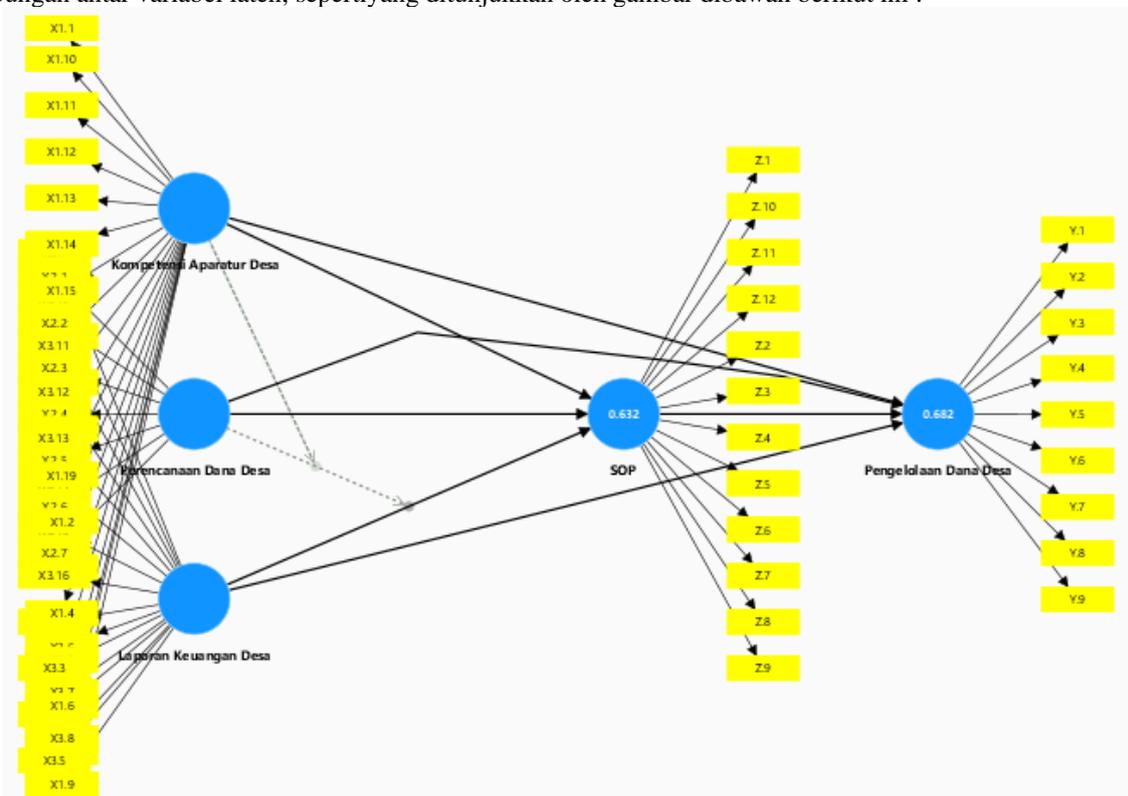
Tabel 6
Construct Reliability and Validity

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_c)
Kompetensi Aparatur Desa	0.902	0.916
Laporan Keuangan Desa	0.853	0.872
Pengelolaan Dana Desa	0.835	0.843
Perencanaan Dana Desa	0.731	0.835
SOP	0.851	0.882

Pengujian Reliabilitas memiliki tes yang biasanya terdiri dari 2 (dua) aspek penting dengan masing-masing dilengkapi syarat nilai krusial yang harus dipenuhi, yaitu: *Cronbach's Alpha* ($>0,7$), dan *Composit's Reliability* ($>0,8$). Pada Tabel berikut bisa dipastikan bahwa masing-masing nilai dari variabel telah melebihi syarat nilai krusial yang ditetapkan, maka dari itu dapat dinyatakan bahwa semua data telah reliabel dan telah lolos uji reliabilitas.

Model Struktural (*Inner Model*)

Setelah melakukan Uji Kelayakan Instrumen (*Outer Model*) dan melihat dari hasil uji kelayakan diatas dapat dipastikan bahwa semua variabel telah lolos uji tahap pertama. Selanjutnya, Peneliti akan melakukan tahap kedua yaitu Uji Model Struktural (*Inner Model*) yang dimana tahap kedua ini melakukan proses pengujian untuk melihat hubungan antar variabel laten, seperti yang ditunjukkan oleh gambar dibawah berikut ini:



Gambar 1 Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Sumber: Olah Data (2024)

1. Nilai Koefisien Beta

Koefisien Beta (β) Merupakan Parameter yang menunjukkan seberapa besar pengaruh Variabel bebas (Independent) terhadap variabel terikat (dependent), Nilai ini menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara dua (2) variabel. Nilai Koefisien Beta bisa kita lihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 7
Hasil Uji Nilai Koefisien Beta (β)

	Orginal Sampel (O)	Hubungan
Kompetensi Aparatur Desa x Perencanaan Dana Desa x Laporan Keuangan Desa -> Pengelolaan Dana Desa	0.619	Positif
Kompetensi Aparatur Desa x Perencanaan Dana Desa x Laporan Keuangan Desa -> SOP	0.524	Positif
SOP -> Pengelolaan Dana Desa	0.782	Positif
Kompetensi Aparatur Desa x Perencanaan Dana Desa x Laporan Keuangan Desa -> SOP -> Pengelolaan Dana Desa	0.355	Positif

Sumber: Olah Data (2024)

Dari data yang sudah didapatkan terdapat dua indikasi dalam penelitian kali ini, semua nilai menunjukkan Nilai Positif yang memperlihatkan Hubungan Positif yang jika variabel bebas meningkat maka variabel terikat juga meningkat.

2. Uji T

Uji T merupakan proses pengujian data untuk mengetahui atau menguji signifikansi Koefisien Beta secara statistik. Nilai T-statistik merupakan rasio antara Koefisien Beta dan Standar Error-nya, Nilai Kritis dari T-Statistik ini adalah 2,02 dengan p-values ($<0,05$) setelah nilai tersebut terpenuhi maka koefisien beta menunjukkan pengaruh yang signifikan. Hasil Uji T bisa kita lihat dari Tabel dibawah ini:

Tabel 8
Hasil Uji-T

	T statistics ((O/STDEV))	P values	Signifikan (Sig)
Kompetensi Aparatur Desa x Perencanaan Dana Desa x Laporan Keuangan Desa -> Pengelolaan Dana Desa	3.485	0.002	Signifikan
Kompetensi Aparatur Desa x Perencanaan Dana Desa x Laporan Keuangan Desa -> SOP	2.659	0.005	Signifikan
SOP -> Pengelolaan Dana Desa	4.777	0.000	Signifikan
Kompetensi Aparatur Desa x Perencanaan Dana Desa x Laporan Keuangan Desa -> SOP -> Pengelolaan Dana Desa	2.610	0.007	Signifikan

Sumber: Olah Data (2024)

Masing – masing Hubungan Variabel menunjukkan nilai T-statistik yang lebih tinggi dari nilai krusial yaitu 2,02 serta diikuti dengan nilai p-values yang menunjukkan $<0,05$. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa nilai Koefisien Beta dari hasil Uji T Signifikan (Sig).

3. Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

Besarnya *coefficient determination (R-square)* digunakan untuk mengukur proporsi total variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen, nilai R^2 berkisar antara 0 dan 1. Chin menyebutkan hasil R^2 sebesar 0,67 ke atas untuk variabel laten dependen dalam model struktural mengindikasikan pengaruh variabel independen (yang mempengaruhi) terhadap variabel dependen (yang dipengaruhi) termasuk dalam kategori baik. Sedangkan jika hasilnya sebesar 0,33-0,67 maka termasuk kategori sedang, dan jika hasilnya sebesar 0,19-0,33 maka termasuk dalam kategori lemah.

Tabel 9
Hasil Uji R-square (R^2)

	R-Square
Pengelolaan Dana Desa	0,682
SOP	0,632

Sumber : Olah Data (2024)

Berdasarkan Hasil uji R-square (R^2) pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kedua variabel terikat yaitu Pengelolaan Dana Desa dan SOP menunjukkan nilai $R^2 < 0$, maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa variabel dependen dapat di jelaskan oleh variabel independent. Nilai R^2 pada Pengelolaan Dana Desa adalah sebesar 0,682 atau dapat dikatakan sebesar 68,2%, yang dapat diartikan pengaruh variabel independen yaitu Kompetensi Aparatur Desa, Perencanaan Dana Desa, Laporan Keuangan Desa dalam menjelaskan variabel Loyalitas Pelanggan sebesar 68,2% termasuk dalam Kategori Baik, serta sisanya sebesar 31,8% pengaruh dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar yang sedang dibahas oleh penelitian ini. Sedangkan, Nilai R^2 pada SOP adalah sebesar 0,632 atau dapat dikatakan sebesar 63,2%, yang dapat diartikan pengaruh variabel independen yaitu Kompetensi Aparatur Desa, Perencanaan Dana Desa, Laporan Keuangan Desa dalam menjelaskan variabel SOP sebesar 63,2% termasuk dalam Kategori Sedang, serta sisanya sebesar 36,8% pengaruh dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar yang sedang dibahas oleh penelitian ini.

4. Goodness of Fit (GoF)

Goodness of Fit (GoF) merupakan ukuran yang menggabungkan kualitas model strktural dan model pengukuran untuk menilai kesesuaian model keseluruhan dalm PSL-SEM dengan nilai dan kesesuaian model berkisar di 0 sampai dengan 1 yaitu: 0,1 (rendah), 0,25 (moderat), 0,36 (baik). Dalam proses pengujian Goodness of Fit (GoF) dibutuhkan nilai rata-rata dari Indeks Komunalitas dan nilai rata-rata R^2 (Koefisien Determinasi) untuk variabel dependen dalam model. Indeks Komunalitas dalam konteks ini adalah AVE (Average Variance Extracted).

Untuk menghitung Indeks Komunalitas atau AVE untuk setiap konstruk dihitung sebagai rata-rata dari kuadrat loading factor setiap indikator pada konstruk tersebut. Rumus menghitung rata-rata Indeks Komunalitas:

$$\text{Rata-rata AVE} = \frac{\sum \text{AVE}}{k}$$

Dimana:

- $\sum \text{AVE}$ adalah jumlah dari semua nilai AVE konstruk.
- k adalah jumlah konstruk dalam model

Selanjutnya, untuk menghitung rata-rata R^2 untuk semua variabel dependen dalam model. Rumus menghitung rata-rata nilai R^2 untuk semua variabel dependen dalam model adalah sebagai berikut:

$$\text{Rata-rata } R^2 = \frac{\sum R^2}{m}$$

Dimana:

- $\sum R^2$ adalah jumlah dari semua nilai R^2 untuk variabel dependen.
- m adalah jumlah variabel dependen dalam model.

Serta, untuk Langkah terakhir adalah menghitung nilai Goodness of Fit (GoF), GoF merupakan akar kuadrat dari hasil kali rata-rata AVE dan rata-rata R^2 . Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai Goodness of Fit adalah sebagai berikut :

$$\text{GoF} = \sqrt{\text{Rata-rata AVE} \times \text{Rata-rata } R^2}$$

Setelah mengetahui semua rumus yang digunakan dalam proses pengujian Goodness of Fit, selanjutnya akan dilakukan pengujian GoF yang sebenarnya, sebagai berikut

$$\text{Rata - rata AVE} = \frac{3,119}{5} = 0,6238$$

$$\text{Rata - rata } R^2 = \frac{1,314}{2} = 0,657$$

$$\text{Goodness Of Fit} = \sqrt{(0,6238 \times 0,657)} = \sqrt{0,41} = 0,640$$

Dari hasil pengujian dan perhitungan Goodness of Fit diatas didapatkan hasil perhitungan sebesar 0,640. Dengan ini, dapat disimpulkan bahwa Goodness of Fit pada model penelitian ini dengan kesesuaian model dianggap **Baik**.

5. Q^2 (Predictive Relevance)

Q^2 atau Predict Relevance merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan prediktif model dalam PLS-SEM. Q^2 mengukur seberapa baik nilai observasi dapat direkonstruksi oleh model dan parameter estimasinya. Variabel ataupun data dikatakan dapat memprediksi model dengan baik apabila nilai $Q^2 > 0$, namun sebaliknya, jika Variabel ataupun data dikatakan belum dapat memprediksi model dengan baik apabila nilai $Q^2 < 0$.

Tabel 10
Hasil Uji Q^2 (Predictive Relevance)

	Q^2 Predict
Pengelolaan Dana Desa	0,667
SOP	0,635

Sumber: Olah Data (2024)

Melihat hasil uji Q^2 (Predictive Relevance) diatas meliputi, yang pertama nilai Q^2 Pengelolaan Dana Desa adalah 0,667 hal ini menandakan bahwa variabel Pengelolaan Dana Desa yang dipengaruhi oleh variabel Kompetensi Aparatur Desa, Perencanaan Dana Desa, Laporan Keuangan Desa dapat memprediksi model dengan baik dan sesuai Gambaran model penelitian di lapangan karena mendapatkan nilai $Q^2 > 0$. Yang kedua, nilai Q^2 SOP adalah 0,635 hal ini menandakan bahwa variabel SOP yang dipengaruhi oleh variabel Kompetensi Aparatur Desa, Perencanaan Dana Desa, Laporan Keuangan Desa dapat memprediksi model dengan baik dan sesuai Gambaran model penelitian di lapangan karena mendapatkan nilai $Q^2 > 0$.

Uji Hipotesis

Dalam pengujian Hipotesis mencakup dua pengaruh, yang pertama Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung, dan yang kedua Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung. Hasil Pengujian akan dijelaskan dibawah ini:

1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung

Sesuai dengan olah data yang telah dilakukan menggunakan SmartPLS v4, telah didapatkan hasil untuk menjawab hipotesis yang telah di deskripsikan pada penelitian ini. Uji Hipotesis yang akan dilakukan melihat hasil pada Koefisien Jalur, *T-statistics*, dan juga *P-values* yang didapatkan dari Calculate yang dilakukan oleh SmartPLS dengan teknik *Bootstrapping*. Hasil Hipotesis dapat dinyatakan diterima apabila *P-values* $< 0,05$, Hasil Uji Hipotesis Pengaruhu Langsung adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Langsung

	Hipotesis	Koefisien Jalur	T-values	P-values	Kesimpulan
H2	Kompetensi Aparatur Desa x Perencanaan Dana Desa x Laporan Keuangan Desa -> SOP	0.524	2.659	0.005	Diterima
H3	SOP -> Pengelolaan Dana Desa	0.782	4.777	0.000	Diterima

Sumber: Olah Data (2024)

a. Kompetensi Aparatur Desa, Perencanaan Dana Desa, Laporan Keuangan Desa terhadap SOP (H2)

Hasil Uji Statistik bisa dilihat pada table 11 bahwa hasil yang di peroleh nilai koefisien Variabel Kompetensi Aparatur Desa, Perencanaan Dana Desa, Laporan Keuangan Desa terhadap SOP sebesar 0,524 dimana T-values sebesar 2.659 $>$ T-tabel (2,02) dengan perolehan P-values sebesar 0,005 $<$ Tingkat Sig ($<$ 0,05), dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa, Perencanaan Dana Desa, Laporan Keuangan Desa mempengaruhi SOP, yang dinyatakan dengan Kompetensi Aparatur Desa, Perencanaan Dana Desa, Laporan Keuangan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap SOP.

b. SOP terhadap Pengelolaan Dana Desa (H3)

Hasil Uji Statistik bisa dilihat pada tabel 11 bahwa hasil yang di peroleh nilai koefisien Variabel SOP terhadap Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,782 dimana T-values sebesar 4.777 $>$ T-tabel (2,02) dengan perolehan P-values sebesar 0,000 $<$ Tingkat Sig ($<$ 0,05), dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa SOP mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa, yang dinyatakan dengan SOP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

2. Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung

Pengujian Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung (mediasi) di lakukan dengan menggunakan aplikasi SmartPLS v4 melalui *Calculate* Teknik *Bootstrapping*, kemudian melihat hasil Uji Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung pada bagian *Specific Indirect Effects*, hasilnya sebagai berikut:

Tabel 12
Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung

	Hipotesis	Koefisien Jalur	T-values	P-values	Kesimpulan
H1	Kompetensi Aparatur Desa x Perencanaan Dana Desa x Laporan Keuangan Desa -> Pengelolaan Dana Desa	0.619	3.485	0.002	Diterima
H4	Kompetensi Aparatur Desa x Perencanaan Dana Desa x Laporan Keuangan Desa -> SOP -> Pengelolaan Dana Desa	0.355	2.610	0.007	Diterima

Sumber: Olah Data (2024)

- a. Kompetensi Aparatur Desa x Perencanaan Dana Desa x Laporan Keuangan Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (H1)

Hasil Uji Statistik bisa dilihat pada tabel 12 bahwa hasil yang di peroleh nilai koefisien Variabel Kompetensi Aparatur Desa x Perencanaan Dana Desa x Laporan Keuangan Desa pada Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,619 dimana T-values sebesar 3,485 > T-tabel (2,02) dengan perolehan P-values sebesar 0,002 < Tingkat Sig (< 0,05), dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa x Perencanaan Dana Desa x Laporan Keuangan Desa mempengaruhi Pengelolaan Dana Desa melalui Loyalitas Pelanggan, yang dinyatakan dengan Kompetensi Aparatur Desa x Perencanaan Dana Desa x Laporan Keuangan Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa.

- b. Kompetensi Aparatur Desa x Perencanaan Dana Desa x Laporan Keuangan Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa melalui SOP (H4)

Hasil Uji Statistik bisa dilihat pada tabel 12 bahwa hasil yang di peroleh nilai koefisien Variabel Kualitas Produk pada Minat Beli melalui Loyalitas Pelanggan sebesar 0,335 dimana T-values sebesar 2,610 > T-tabel (2,02) dengan perolehan P-values sebesar 0,007 < Tingkat Sig (< 0,05), dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Desa x Perencanaan Dana Desa x Laporan Keuangan Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa melalui SOP, yang dinyatakan Kompetensi Aparatur Desa x Perencanaan Dana Desa x Laporan Keuangan Desa berpengaruh positif dan terhadap Pengelolaan Dana Desa melalui SOP.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa x Perencanaan Dana Desa x Laporan Keuangan Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (H1)

Pengelolaan Dana Desa merupakan aspek krusial dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebuah studi terbaru telah mengungkapkan temuan yang menarik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana tersebut. Penelitian ini berfokus pada tiga variabel utama: Kompetensi Aparatur Desa, Perencanaan Dana Desa, dan Laporan Keuangan Desa, serta bagaimana interaksi ketiga faktor ini berdampak pada Pengelolaan Dana Desa secara keseluruhan. Hasil uji statistik yang disajikan dalam tabel 12 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-variabel tersebut. Koefisien variabel interaksi antara Kompetensi Aparatur Desa, Perencanaan Dana Desa, dan Laporan Keuangan Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa mencapai angka 0,619. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh positif yang cukup kuat dari ketiga faktor tersebut secara bersama-sama terhadap pengelolaan dana desa.

Lebih lanjut, nilai T-values yang diperoleh sebesar 3,485 melebihi nilai T-tabel yang ditetapkan sebesar 2,02. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh memiliki signifikansi statistik yang kuat. Hal ini diperkuat dengan nilai P-values sebesar 0,002, yang jauh lebih rendah dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Temuan ini semakin menegaskan bahwa interaksi ketiga variabel tersebut memang memiliki pengaruh yang nyata dan tidak dapat diabaikan dalam konteks pengelolaan dana desa. Interpretasi dari hasil statistik ini mengarah pada kesimpulan bahwa kombinasi antara Kompetensi Aparatur Desa, Perencanaan Dana Desa, dan Laporan Keuangan Desa secara bersama-sama memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memperhatikan ketiga aspek tersebut secara simultan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi para pemangku kepentingan di tingkat desa maupun pembuat kebijakan di tingkat yang lebih tinggi. Pertama, hasil ini menekankan bahwa peningkatan kompetensi aparatur desa harus menjadi prioritas. Aparatur desa yang kompeten akan lebih mampu merencanakan penggunaan dana desa dengan baik dan menyusun laporan keuangan yang akurat. Kedua, proses perencanaan dana desa perlu dilakukan dengan cermat dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa dana tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Ketiga, penyusunan laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan penggunaan dana yang efektif. Dengan memperhatikan ketiga aspek ini secara bersamaan, diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan lebih optimal. Hal ini

pada gilirannya akan mendorong percepatan pembangunan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan tercapainya tujuan-tujuan pemberdayaan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa dan pihak-pihak terkait untuk mengembangkan strategi yang komprehensif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana desa, dengan mempertimbangkan interaksi antara kompetensi aparatur, perencanaan yang matang, dan pelaporan keuangan yang baik.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Perencanaan Dana Desa, Laporan Keuangan Desa terhadap SOP (H2)

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Perencanaan Dana Desa, dan Laporan Keuangan Desa terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan aspek penting dalam pengelolaan pemerintahan desa yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil uji statistik yang ditampilkan pada tabel 11, terdapat bukti kuat yang menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara ketiga variabel independen tersebut dengan SOP di tingkat desa. Analisis statistik mengungkapkan bahwa nilai koefisien untuk variabel-variabel Kompetensi Aparatur Desa, Perencanaan Dana Desa, dan Laporan Keuangan Desa terhadap SOP adalah sebesar 0,524. Angka ini menggambarkan kekuatan hubungan antara variabel-variabel independen dan variabel dependen. Lebih lanjut, nilai T-values yang diperoleh sebesar 2,659 melebihi nilai T-tabel yang ditetapkan sebesar 2,02. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan yang diamati memiliki signifikansi statistik yang kuat.

Tingkat signifikansi hubungan ini semakin diperkuat dengan perolehan P-values sebesar 0,005, yang jauh lebih rendah dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Hasil ini memberikan keyakinan bahwa temuan penelitian ini bukan merupakan kebetulan, melainkan mencerminkan hubungan yang nyata dalam populasi yang diteliti. Interpretasi dari hasil statistik ini mengarah pada kesimpulan bahwa Kompetensi Aparatur Desa, Perencanaan Dana Desa, dan Laporan Keuangan Desa memang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap implementasi dan efektivitas SOP di tingkat desa. Hal ini mengisyaratkan bahwa peningkatan dalam ketiga aspek tersebut cenderung akan diikuti oleh peningkatan kualitas SOP yang diterapkan di desa.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pengelolaan pemerintahan desa. Pertama, hal ini menekankan pentingnya pengembangan kompetensi aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Kedua, hasil ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dana desa yang matang dan transparan berperan crucial dalam mendukung implementasi SOP yang efektif. Ketiga, kualitas dan akurasi laporan keuangan desa terbukti memiliki dampak signifikan terhadap SOP, yang mungkin mencerminkan pentingnya akuntabilitas dan tata kelola yang baik dalam operasional pemerintahan desa. Dengan demikian, para pemangku kepentingan di tingkat desa maupun pengambil kebijakan di tingkat yang lebih tinggi perlu memberikan perhatian khusus pada peningkatan ketiga aspek ini. Upaya untuk meningkatkan kompetensi aparatur, memperbaiki proses perencanaan dana, dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan desa dapat menjadi strategi efektif dalam memperkuat SOP dan pada akhirnya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan.

Pengaruh SOP terhadap Pengelolaan Dana Desa (H3)

Standar Operasional Prosedur (SOP) memainkan peran krusial dalam pengelolaan Dana Desa yang efektif dan efisien. Hasil uji statistik yang disajikan pada tabel 11 memberikan bukti empiris yang kuat mengenai pengaruh positif dan signifikan SOP terhadap Pengelolaan Dana Desa. Analisis ini menunjukkan bahwa implementasi SOP yang baik dapat secara langsung meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa. Nilai koefisien variabel SOP terhadap Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,782 mengindikasikan adanya hubungan positif yang kuat antara kedua variabel tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan dalam penerapan dan kualitas SOP akan diikuti oleh peningkatan yang proporsional dalam efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Koefisien yang cukup tinggi ini menekankan pentingnya SOP sebagai instrumen fundamental dalam tata kelola keuangan desa.

Lebih lanjut, T-values yang diperoleh sebesar 4,777 melebihi nilai T-tabel (2,02), memberikan konfirmasi statistik bahwa pengaruh SOP terhadap Pengelolaan Dana Desa adalah signifikan. Hal ini diperkuat oleh P-values sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan antara SOP dan Pengelolaan Dana Desa bukan merupakan hasil kebetulan, melainkan mencerminkan pola yang konsisten dan dapat diandalkan. Implikasi dari hasil uji statistik ini sangat penting bagi para pemangku kepentingan di tingkat desa. Pertama, temuan ini menegaskan bahwa investasi dalam pengembangan dan implementasi SOP yang komprehensif dan terperinci dapat memberikan dampak positif yang substansial terhadap pengelolaan Dana Desa. Kedua, hal ini juga menggarisbawahi pentingnya pelatihan dan sosialisasi SOP kepada seluruh aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan Dana Desa.

Dengan adanya bukti empiris ini, pemerintah desa dapat lebih yakin dalam mengalokasikan sumber daya untuk memperbaiki dan memperbarui SOP secara berkala. Hal ini dapat mencakup penyusunan prosedur yang lebih rinci, pembuatan diagram alur yang jelas, serta pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP. Selain itu, temuan ini juga dapat menjadi dasar bagi pemerintah di tingkat kabupaten atau provinsi untuk memberikan dukungan lebih lanjut kepada desa-desa dalam hal pengembangan kapasitas terkait SOP. Ini bisa meliputi program pendampingan, workshop, atau bahkan pengembangan template SOP yang dapat diadaptasi oleh masing-masing desa sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokalnya. Kesimpulannya,

hasil uji statistik ini memberikan landasan yang kuat untuk menekankan pentingnya SOP dalam konteks Pengelolaan Dana Desa. Dengan pengaruh positif dan signifikan yang telah dibuktikan, implementasi SOP yang baik dapat menjadi kunci untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan desa, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kompetensi Aparatur Desa x Perencanaan Dana Desa x Laporan Keuangan Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa melalui SOP (H4)

Hasil uji statistik yang disajikan pada tabel 12 memberikan gambaran yang menarik mengenai hubungan antara variabel-variabel kunci dalam pengelolaan dana desa. Analisis ini berfokus pada interaksi kompleks antara Kompetensi Aparatur Desa, Perencanaan Dana Desa, dan Laporan Keuangan Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa, dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai variabel intervening. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi efektivitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan desa. Data statistik menunjukkan bahwa koefisien variabel yang diuji memiliki nilai sebesar 0,335. Angka ini mengindikasikan adanya hubungan positif antara variabel-variabel independen (Kompetensi Aparatur Desa, Perencanaan Dana Desa, dan Laporan Keuangan Desa) terhadap variabel dependen (Pengelolaan Dana Desa) melalui SOP. Koefisien positif ini menggambarkan bahwa peningkatan pada variabel-variabel independen cenderung diikuti oleh peningkatan dalam efektivitas Pengelolaan Dana Desa, dengan SOP berperan sebagai faktor penghubung yang signifikan.

Lebih lanjut, nilai T-values yang diperoleh sebesar 2,610 memperkuat signifikansi hubungan ini. Mengingat nilai T-values ini melebihi T-tabel yang ditetapkan (2,02), hasil ini memberikan bukti statistik yang kuat untuk mendukung hipotesis penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan yang diamati bukanlah hasil dari kebetulan, melainkan mencerminkan pola yang konsisten dan dapat diandalkan dalam populasi yang diteliti. P-values yang tercatat sebesar 0,007 semakin menegaskan signifikansi temuan ini. Dengan nilai yang jauh di bawah tingkat signifikansi standar 0,05, hasil ini menunjukkan bahwa probabilitas terjadinya kesalahan Tipe I (menolak hipotesis nol ketika sebenarnya benar) sangat rendah. Dengan kata lain, kita dapat memiliki keyakinan tinggi bahwa hubungan yang diamati antara variabel-variabel tersebut memang nyata dan bukan hasil dari variasi sampling yang acak.

Interpretasi dari temuan statistik ini mengarah pada kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari interaksi Kompetensi Aparatur Desa, Perencanaan Dana Desa, dan Laporan Keuangan Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa, dengan SOP berperan sebagai mediator penting dalam hubungan ini. Hasil ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam kerangka SOP yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Temuan ini memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi pemerintahan desa dan pembuat kebijakan. Pertama, hasil ini menekankan pentingnya investasi dalam peningkatan kompetensi aparatur desa, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan perencanaan. Kedua, penelitian ini menggarisbawahi peran krusial dari perencanaan yang matang dalam alokasi dan penggunaan dana desa. Ketiga, pentingnya laporan keuangan yang akurat dan transparan juga disorot sebagai komponen vital dalam tata kelola yang baik. Terakhir, peran sentral SOP dalam memediasi hubungan ini menunjukkan bahwa standarisasi proses dan prosedur dapat menjadi katalis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa secara keseluruhan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara Kompetensi Aparatur Desa, Perencanaan Dana Desa, dan Laporan Keuangan Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa, baik secara langsung maupun melalui mediasi Standar Operasional Prosedur (SOP). Penelitian ini mengungkapkan bahwa ketiga faktor tersebut, ketika berinteraksi secara simultan, memiliki dampak yang kuat terhadap efektivitas pengelolaan dana desa dengan koefisien jalur sebesar 0,619 dan nilai T-statistics 3,485 ($>2,02$). SOP terbukti memainkan peran penting sebagai variabel intervening, dengan pengaruh tidak langsung sebesar 0,355 (T-statistics 2,610 $> 2,02$). Lebih lanjut, SOP sendiri memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan koefisien jalur 0,782 (T-statistics 4,777 $> 2,02$). Nilai R-square untuk Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,682 menunjukkan bahwa 68,2% variasinya dapat dijelaskan oleh model. Goodness of Fit (GoF) sebesar 0,640 mengindikasikan kesesuaian model yang baik. Temuan ini menekankan pentingnya pengembangan kompetensi aparatur desa, perencanaan yang matang, pelaporan keuangan yang akurat, serta implementasi SOP yang komprehensif untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Implikasi dari penelitian ini mengarah pada kebutuhan akan strategi yang terintegrasi dalam pengelolaan dana desa, yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur, perbaikan proses perencanaan, peningkatan transparansi laporan keuangan, dan penguatan SOP.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Pertama, pemerintah daerah dan pusat perlu merancang program pelatihan komprehensif untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa, terutama dalam aspek perencanaan keuangan, pengelolaan dana, dan penyusunan laporan keuangan. Kedua, perlu dikembangkan sistem perencanaan dana desa yang lebih partisipatif dan

transparan, melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa. Ketiga, standarisasi format dan prosedur pelaporan keuangan desa harus ditingkatkan untuk memastikan akurasi dan konsistensi. Keempat, penyusunan dan implementasi SOP yang komprehensif dan mudah dipahami harus menjadi prioritas, disertai dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif. Kelima, perlu dibangun sistem informasi terpadu yang memungkinkan integrasi data dan informasi terkait pengelolaan dana desa, dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Terakhir, penting untuk membangun mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat desa secara aktif, guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan dana desa, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Berikut adalah hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada para pembaca yang telah berpartisipasi dan mengikuti proses penelitian ini. Peneliti juga sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna meningkatkan kualitas penelitian di masa mendatang. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan karya ilmiah ini.

REFERENSI

- [1] U. Usman and F. Rahmawati, "Analisis Faktor Penentu Keberhasilan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa," *J. Ekon. Bisnis*, vol. 12, no. 1, pp. 71–82, Jul. 2024, doi: 10.58406/jeb.v12i1.1532.
- [2] Mainunah Sambas and Guntur Eko Saputro, "Village Fund Management On The Improvement Of Community Economy," *Int. J. Humanit. Educ. Soc. Sci.*, vol. 3, no. 6, Jun. 2024, doi: 10.55227/ijhess.v3i6.981.
- [3] S. Minarni, P. Raharjo, T. Soemartono, T. H. Rachmatsyah, and S. Sarida, "The Effectiveness of Funds on Village Development Strategies in Klaten District," *Int. J. Innov. Res. Multidiscip. Educ.*, vol. 03, no. 02, Feb. 2024, doi: 10.58806/ijirme.2024.v3i2n14.
- [4] H. Iwawan Aji, A. Sholahuddin, and T. Harianto, "The Role of Village Government in Managing Funds and Implementing Development," *Int. J. Res. Soc. Sci. Humanit.*, vol. 05, no. 03, pp. 53–60, 2024, doi: 10.47505/IJRSS.2024.3.5.
- [5] S. Winarsi and D. Kristianti, "Village Fund Management In The Perspective Of State Finances For The Purpose Of Rural Community Empowerment," in *Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Globalization 2017 (ICLGG 2017)*, Paris, France: Atlantis Press, 2018. doi: 10.2991/iclgg-17.2018.36.
- [6] S. Hajar, K. Kholik, and N. Ambia Arma, "Village Fund Policy Based Planning Development," *Iapa Proc. Conf.*, p. 190, Dec. 2022, doi: 10.30589/proceedings.2022.692.
- [7] E. Putubasai, "Analysis Of Community And Village Government Participation In Village Fund Management," *Saburai Int. J. Soc. Sci. Dev.*, vol. 1, no. 2, pp. 32–38, May 2018, doi: 10.24967/saburajssd.v2i1.329.
- [8] "Village Fund Optimization Strategy For Rural Community Welfare In Indonesia," *J. Crit. Rev.*, vol. 7, no. 07, Apr. 2020, doi: 10.31838/jcr.07.07.103.
- [9] I. R. Hambali and I. Y. Niode, "Management Model of Village Fund Allocation in Enhancing the Village's Productive Economic Activities," *Bus. Econ. Res.*, vol. 8, no. 4, p. 1, Sep. 2018, doi: 10.5296/ber.v8i4.13489.
- [10] H. S. Mulyani, L. Suparto, D. Sudirno, Masduki, and E. Prihartini, "Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Desa Berdasarkan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Di Desa Cikalong Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka," *BERNAS J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 3, no. 4, pp. 563–568, Oct. 2022, doi: 10.31949/jb.v3i4.2959.
- [11] C. I. Burhanuddin, S. Syamsuddin, M. Nurdin, F. N. A. Ibrahim, and R. Rismayanti, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Masyarakat Desa," *Owner*, vol. 6, no. 4, pp. 3950–3958, Oct. 2022, doi: 10.33395/owner.v6i4.1162.

- [12] T. Arbain and E. Ariyani, "Village Funds Mismanagement in Policy Evaluation Perspective in Jejangkit Pasar Village of South Kalimantan," *Iapa Proc. Conf.*, p. 427, Nov. 2019, doi: 10.30589/proceedings.2019.287.
- [13] Badan Kebijakan Fiskal, "No Title," 2024.
- [14] BPPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "No Title."
- [15] S. Priantono and E. D. Vidiyastutik, "The Influence of Internal Control System and Accountability of Village Fund Allocation Management on Village Financial Performance," *Int. J. Soc. Sci. Bus.*, vol. 6, no. 1, pp. 18–26, 2022, doi: 10.23887/ijssb.v6i1.40068.
- [16] V. Viverita, R. D. Astuti, F. Martdianty, and R. D. Kusumastuti, "Village Fund Management, Quality Of Life And Community Wellbeing: Evidence From Lebak Regency, Indonesia," *J. Southwest Jiaotong Univ.*, vol. 57, no. 3, pp. 468–483, Jun. 2022, doi: 10.35741/issn.0258-2724.57.3.38.
- [17] A. Sahabi, S. Dewi Yusuf, R. Mohamad, and S. S., "Maslahat Dana Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Madani Di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan," *Manaj. Keuang. Syariah*, vol. 2, no. 2, pp. 61–70, Sep. 2022, doi: 10.30631/makesya.v2i2.1343.
- [18] R. H. Yustrianthe, Y. Darmawan, B. P. Jati, and A. Kuntoro, "Pelatihan Komputerisasi Akuntansi Dengan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kompetensi Guru," *J. Terap. Abdimas*, vol. 7, no. 2, p. 238, Jul. 2022, doi: 10.25273/jta.v7i2.12946.
- [19] Sarifudin Mada, "No Title," Pengaruh Kompetensi Apar. Pengelola Dana Desa, Komitmen Organ. Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masy. Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo, 2017, doi: <http://dx.doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>.
- [20] T. R. Sari and A. Rohman, "Analysis of Factors Affecting Accountability of Village Fund Management," *Quant. Econ. Manag. Stud.*, vol. 5, no. 2, pp. 269–282, Apr. 2024, doi: 10.35877/454RI.qems2409.
- [21] H. Fitra, E. Syofyan, E. Masdupi, E. Mulyani, S. Taqwa, and H. Halmawati, "The Influence of Competence and Organizational Commitment on Village Fund Management Accountability with Transparency as a Mediating Variable," *J. Inov. Pendidik. Ekon.*, vol. 14, no. 1, p. 95, Jun. 2024, doi: 10.24036/011285410.
- [22] "Sari, M., Rachman, H., Astuti, N. J., Afgani, M. W., & Siroj, R. A.. (2022). Explanatory Survey dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif. 3(01). <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1953>", doi: <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1953>.
- [23] Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D," *Bandung CV. Alif.*, 2019.
- [24] T. P. Kota and S. Y. Kusumastuti, "Analisis Pengaruh Minat Nasabah Dalam Menggunakan Mobile Banking Dengan Menggunakan Kerangka Technology Acceptance Model (TAM)," *J. Apresiasi Ekon.*, 2022.
- [25] "Syahrizal, H., & Jailani, S.. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>," 2023, doi: doi.org/10.61104/jq.v1i1.49.
- [26] "Salamun, H. M., Tukan, M., & Tutuhaturanewa, A.. (2023). Aplikasi metode structural equation modeling dalam menganalisis variabel-variabel yang memengaruhi loyalitas pelanggan produk kebab turki. 3(1). <https://doi.org/10.30598/i-tabaos.2023.3.1.31-42>", doi: <https://doi.org/10.30598/i-tabaos.2023.3.1.31-42>.
- [27] "Cheah, J.H., Magno, F., & Cassia, F. (2023). Reviewing the SmartPLS 4 software: The latest features and enhancements. *Journal of Marketing Analytics.*," *J. Mark.*, 2023.
- [28] "Advanced marketing analytics using partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). *Journal of Marketing Analytics*, 2023.," *J. Mark. Anal.* 2023., 2023.

[29] Irwan and K. Adam, “Metode Partial Least Square (Pls) Dan Terapannya (Studi Kasus: Analisis Kepuasan Pelanggan terhadap Layanan PDAM Unit Camming Kab. Bone),” *J. Teknosains*, vol. 9, no. 1, pp. 53–68, 2015, doi: <https://doi.org/10.24252/teknosains.v9i1.1856>.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.